



Kepulauan Seribu Dibuat Lebih Produktif

JAKARTA – Pembangunan Kepulauan Seribu diharapkan dapat lebih produktif. Hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan kepariwisataan dan untuk mewadahi kepentingan seluruh warga secara luas.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyampaikan ini dalam jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu.

"Dalam perencanaan pembangunan Jakarta, pelaksanaannya wajib mempertimbangkan cara-cara inklusif, termasuk di Kabupaten Kepulauan Seribu," ujar Heru, dikutip *jakartagoid*, Senin (20/11). Hal ini sejalan dengan muatan usulan Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jakarta.

Raperda mengintegrasikan ruang darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sinkronisasi penataan ruang tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Selanjutnya, Heru menangan-

gapi pemerataan penyediaan infrastruktur Kepulauan Seribu. Menurutnya, saat ini penyediaan infrastruktur dasar, mulai dari akses transportasi, energi listrik, air bersih, dan telekomunikasi sudah menjadi perhatian utama.

Infrastruktur itu untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana umum. Ini akan masuk dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi Jakarta. Heru menyampaikan satu per satu pembangunan infrastruktur dasar diupayakan.

Perwujudannya melalui program pemerintah dan sinergi penyediaan yang me-

libatkan swasta dan masyarakat. Terkait keterbatasan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten Kepulauan Seribu, lanjut Heru, kini telah menemui titik terang.

Pemprov Jakarta menyiapkan Rencana Aksi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan mempertimbangkan estimasi jumlah penduduk dan ketersediaan lahan. Untuk kebijakan yang berorientasi mitigasi perubahan iklim dan peningkatan permukaan air laut, Gubernur Heru menegaskan, setiap kebijakan yang disusun telah melalui

pertimbangan dampak dan risikonya.

"Pelaksanaan program pembangunan Jakarta telah memuat aspek keberlanjutan. Hal ini termasuk penerapan kebijakan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil," ujarnya.

Sedangkan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan untuk masyarakat Kepulauan Seribu, telah diintegrasikan ke dalam Raperda RTRW. Di dalamnya memuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk menjaga ketahanan pangan.

■ wid/G-1